

**PENGARUH KARATERISTIK KEPALA DAERAH, UKURAN PEMERINTAH, DAN
TEMUAN AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kab/Kota Di Pulau Sulawesi)**

Ai Andi Tabita Tandiseru¹⁾

¹Fakultas Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Kristen Satya Wacana

E-mail :penulis¹ 232018196@student.uksw.edu

David Adechandra Ashedica Pesudo²⁾

²Fakultas Ekonomika dan Bisnis/Universitas Kristen Satya Wacana

E-mail :penulis² david.pesudo@uksw.edu

Abstract

Financial performance is a manifestation of regional achievements in a certain period related to regional finances. This study has a purpose, namely to examine whether there is an influence of the characteristics of regional heads, government size, audit findings on the financial performance of local governments in districts/cities on Sulawesi Island in 2018-2020. The population used in this study is from the district/city government on the island of Sulawesi. The sampling method used purposive sampling. This study uses secondary data with the data source used, namely the financial reports of the district/city governments on the island of Sulawesi in 2018-2020. Hypothesis testing in this study uses multiple linear analysis using the SPSS program. The results showed that the government size variable had a positive and significant effect on the government's financial performance. The characteristic variable has no influence on the financial performance of the local government. The results of the BPK audit findings variable test have a negative and significant effect on financial performance.

Keywords :pemerintah, ukuran, katakarakteristik, temuan, kinerja

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh kepala daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dalam kewenangan otonom menurut UU No 23 tahun 2014. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif potensi lokal dalam rangka peningkatan kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan (Mustikarini & Fitriyani 2007). Salah satu cara dalam pencapaian pemerintahan yang baik yaitu dengan melakukan pengukuran kinerja pemerintah. Kinerja keuangan merupakan kinerja yang dapat dinilai dengan ukuran angka sedangkan kinerja non keuangan merupakan kinerja yang tidak dapat dinilai dengan ukuran angka dalam satuan nilai uang (Pahlevi & Setiawan 2017). Menurut PP No. 105 pasal 4 yaitu tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa dalam mengelola keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Tama & Adi 2018) terdapat beberapa faktor untuk mengukur kinerja pemerintah, yaitu karakteristik kepala daerah, karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit. Karakteristik Pemerintah Daerah adalah sebuah identitas/karakter yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah yang memiliki perbedaan antar pemerintah daerah (Suryaningsih & Sisdyani 2016). Karakteristik kepala daerah dapat diukur dengan beberapavariabel yaitu masa kerja, umur, tingkat pendidikan, dan gender. Hasil pengujian hipotesis penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Tama & Adi 2018) variabel karakteristik kepala daerah yaitu masa kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah sedangkan umur dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbeda

dengan hasil pengujian hipotesis penelitian yang dilakukan oleh (Pahlevi & Setiawan 2017) variabel karakteristik kepala daerah yaitu usia, masa kerja, gender memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah sedangkan tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Fator-faktor yang terdapat dalam karakteristik pemerintah daerah menurut penelitian dari Hendro Sumarjo (2010) yaitu ukuran (*size*) pemerintah yang dapat diukur dari jumlah total aset dalam pemerintahan daerah, kemakmuran (*wealth*), dan ketergantungan pada pemerintah pusat. Dalam penelitian ini menggunakan ukuran (*size*) pemerintah yang dapat dilihat dari nilai total aset dalam neraca pemerintah daerah. Semakin besar *size* yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka akan membantu pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Aziz (2016) bahwa ketika suatu daerah memiliki tingkat ukuran pemerintah yang besar maka pemerintah daerah memiliki peluang yang besar juga dalam menjalankan kegiatan operasional dan roda pemerintahan daerah, begitupun sebaliknya ketika tingkat ukuran pemerintah rendah maka pemerintah daerah akan kesusahan dalam menjalankan kegiatan operasional dikarenakan kurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini juga menggunakan jumlah temuan audit yang merupakan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Pemerintah daerah dalam menjalankan masa pemerintahannya, wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Dalam penyusunan LK (Laporan Keuangan) wajib mengikuti SA (Standar Akuntansi) pemerintah terbaru yaitu sesuai PP No. 71 Tahun 2010. Untuk mengetahui kelayakan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), maka LKPD harus diuji terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mencegah LKPD dari berbagai jenis tindak kecurangan pada saat pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Hasil hipotesis yang dilakukan oleh peneliti terdahulu (Tama & Adi 2018) mengungkapkan bahwa variabel temuan audit memiliki pengaruh yang negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan oleh (Marfiana & Kurniasih 2013) yaitu bahwa temuan audit BPK memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Fenomena terjadi di Sulawesi Selatan

dimana Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan TA 2020, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Pemerintah Provinsi Sul-Sel TA 2020 (Sulselprov.go.id 2021). Terdapat temuan BPK yaitu ditemukannya saldo aset tetap yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Neraca tetap per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 977,47 miliar, dicatat hanya sebesar biaya fisiknya saja dan belum termasuk biaya-biaya perolehan lainnya. Bpk juga menemukan adanya persediaan yaitu sebesar Rp. 1.07 miliar yang tidak dapat ditelusuri karena pencatatannya tidak memadai (sulteng.bpk.go.id 2009). Penelitian terdahulu yang dilakukan Khasanah & Rahardjo (2014) menyimpulkan bahwa variabel yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu total aset dari kategori karakteristik pemerintah dan jumlah SKPD dari kategori kompleksitas pemerintah. Sedangkan variabel lain yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/kota Jawa Tengah periode 2010-2012 yaitu kekayaan daerah (PAD), tingkat ketergantungan, umur pemerintah daerah, ukuran legislatif dan temuan audit. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Andani, Sarwani, & Respati (2019) menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Terjadinya perbedaan hasil dari penelitian dahulu membuat dilakukannya penelitian kembali mengenai pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Peneliti akan menambah variabel lain pada karakteristik pemda yaitu gender yang merupakan saran dari penelitian Tama & Adi (2018) Pemilihan gender sebagai variabel baru dengan maksud untuk mengetahui kemungkinan adanya pengaruh gender sebagai karakteristik kepala daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi masalah penelitian adalah masih banyaknya kasus yang sering terjadi terkait dengan karakteristik kepala daerah, ukuran pemerintah, bahkan temuan audit dalam kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota khususnya di Sulawesi. Sehingga tujuan dari penelitian adalah untuk menguji apakah adanya pengaruh karakteristik kepala daerah, ukuran pemerintah, temuan audit terhadap kinerja keuangan daerah di Sulawesi. Pertanyaan penelitian bagi peneliti yaitu 1) Apakah ukuran

pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah? 2) Apakah karakteristik kepala daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah? 3) Apakah temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah? Manfaat penelitian ini bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai karakteristik kepala daerah, ukuran pemerintah, dan atau temuan audit yaitu sebagai referensi tambahan yang menyediakan informasi-informasi mengenai hal tersebut dan juga bisa menjadi sumbangan empiris bagi peneliti selanjutnya. Manfaat penelitian ini bagi pemerintah yaitu sebagai bahan pertimbangan atau masukan untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan dalam kemajuan suatu daerah. Kemudian bagi BPK yaitu sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam memeriksa LKPD dan manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai penambah wawasan mengenai hal-hal yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

Telaah Pustaka

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemda merupakan wujud dari pencapaian daerah dalam periode tertentu terkait dengan keuangan daerah. Keuangan daerah yaitu segala hak dan kewajiban suatu daerah dinilai berdasarkan uang dan segala sesuatunya yang berbentuk uang serta barang yang dapat menjadi milik daerah sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut berdasarkan UU No.23 tahun 2014. Keberhasilan suatu daerah dapat dinilai dengan efisiensi dan efektivitas dalam realisasi anggaran suatu daerah. Tujuan dari pengukuran kinerja pemerintah adalah untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan (Suryaningsih & Sisdyani 2016). Pemerintah daerah merupakan pihak yang sangat penting dalam mengelola keuangan daerah. Kinerja pemerintahan dapat dilihat dari hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diharapkan menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kualitas serta dalam pengambilan keputusan.

Karakteristik Kepala Daerah

Karakteristik kepala daerah merupakan suatu ciri yang ada pada kepala daerah yang memiliki perbedaan setiap kepala daerah (Andani, Sarwani, & Respati 2019). Karakteristik kepala daerah mencakup tingkat pendidikan, usia, dan

gender yang merupakan variabel independen (Suryaningsih & Sisdyani 2016). Dalam memilih kepala daerah, karakteristik kepala daerah adalah salah satu hal yang diperlukan dalam mempertimbangkan terkait dengan kualitas dari kepala daerah dan kapabilitasnya dalam memimpin suatu daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Pahlevi & Setiawan (2017) mengungkapkan bahwa kepala daerah yang memiliki pendidikan yang tinggi, berpengalaman, serta umur yang terbilang matang bisa menyesuaikan terhadap perubahan sehingga bisa menentukan keputusan dalam meningkatkan kinerja pemerintahannya. Setiap daerah mengharapkan memiliki kepala daerah yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang bagus. Salah satu cara menilai kualitas dan kapabilitas kepala daerah adalah dengan melihat karakteristik kepala daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan karakteristik kepala daerah yang diukur melalui masa kerja, umur, tingkat pendidikan dan gender dari kepala daerah tersebut.

Ukuran (size) Pemerintah Daerah

Ukuran (size) pemerintah daerah merupakan besarnya atau kecilnya objek suatu pemerintah daerah yang menggunakan sektor privat sebagai bagian dari karakteristik (Andani, Sarwani, & Respati 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Tama & Adi 2018) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah yang memiliki ukuran yang besar dapat membantu kegiatan operasional dan dapat membantu kelancaran sehingga menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah yang memiliki ukuran yang besar juga memiliki tekanan yang besar dalam pengungkapan laporan keuangannya. Sehingga banyak pemerintah daerah cenderung melaporkan *good news* saja dalam kinerja keuangannya (Aziz 2016). Ukuran pemerintah daerah yang digunakan peneliti adalah total aset dalam neraca pemerintah daerah. Tingginya total aset yang dimiliki suatu daerah akan memperlancar kegiatan operasional suatu daerah dan juga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. **Temuan Audit BPK**

Temuan audit BPK adalah temuan BPK berupa kasus pelanggaran atas Undang-undang yang berlaku mengenai pemeriksaan LKPD pemda (Artha, Basuki, & MT 2016). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Noviyanti & Kiswanto

2016) mengatakan bahwa pelanggaran atas undang-undang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian pada suatu pemerintahan daerah yang diakibatkan oleh ketidakefisienan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Banyaknya temuan audit BPK menunjukkan kinerja pemerintah daerah sangat buruk (Noviyanti & Kiswanto 2016). Penelitian ini menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dilihat temuan audit BPK, yaitu banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. **Pengembangan Hipotesis**

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah yang besar memiliki tekanan yang besar juga dalam melakukan pengungkapan kinerja keuangannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) pemerintah daerah yang memiliki ukuran pemerintah yang besar akan mempermudah menjalankan kegiatan operasional dalam suatu daerah dan juga memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemajuan daerah yang merupakan bukti peningkatan daerah. Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Aziz 2016) mengungkapkan bahwa besarnya ukuran suatu daerah yang diukur dari besarnya total aset diharapkan memiliki kinerja pemerintah daerah yang tinggi. Semakin besar ukuran pemerintah daerah (total aset) yang dimiliki suatu daerah, bisa membantu pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehingga ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : H_1 : Ukuran (*size*) pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah

Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kepala daerah memiliki peran penting dalam suatu pemerintahan, seperti yang diungkapkan oleh Pahlevi & Setiawan (2017) dalam penelitiannya bahwa kepala daerah yang memiliki kualitas berperan penting dalam pencapaian tujuan pemerintahan. Selanjutnya penelitian yang

dilakukan oleh (Misdi 2015) menyatakan dibutuhkannya pemimpin daerah yang memiliki kapabilitas dan kompetensi untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan daerah guna meningkatkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki suatu daerah. Peneliti sebelumnya mengungkapkan bahwa pentingnya pengalaman kerja dan umur kepala daerah dalam beradaptasi dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi sehingga diharapkan adanya kreativitas yang mampu dihasilkan pemerintah daerah guna terciptanya kinerja pemerintahan yang baik (Aziz 2016). Penelitian terdahulu menunjukkan peran penting dari tingkat pendidikan kepala daerah dalam kesuksesan suatu otonomi daerah. Perempuan dan laki-laki memiliki karakteristik yang tidak selaras dalam mengelolah suatu informasi. Peneliti terdahulu menyimpulkan bahwa gender memiliki dampak positif bagi kinerja keuangan dimana perempuan bisa mencapai kinerja yang lebih baik (Pahlevi & Setiawan 2017). Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_{2a} : Masa Kerja kepala daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

H_{2b} : Umur kepala daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H_{2c} : Pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

H_{2d} : Gender kepala daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan audit BPK merupakan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan yang menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap ketentuan pengendalian internal atau terhadap perundang-undangan yang berlaku. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti & Kiswanto (2016) mengungkapkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat merugikan suatu daerah dan ketidakefisienan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemda. Banyaknya pelanggaran yang ditemukan oleh BPK menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah tersebut sangatlah buruk

(Tama & Adi 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Marfiana & Kurniasih 2013) mengungkapkan suatu pemda yang memiliki jumlah temuan audit yang cukup besar dalam LK pemerintahannya menunjukkan bahwa kinerja yang buruk. Temuan audit yang sedikit/rendah dapat menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Tinggi rendahnya temuan audit BPK dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan suatu daerah. Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₃ : Temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian kuantitatif untuk menguji hipotesis yang dianjurkan oleh peneliti mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang diukur dengan ukuran (*size*) pemerintah daerah, karakteristik kepala daerah, dan temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data yang digunakan untuk Laporan Tabel 1 Definisi Operasional

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi pada periode 2018-2020 diperoleh dari situs www.kemenkeu.go.id dan www.bpk.go.id serta data non keuangan (umur, masa kerja, tingkat pendidikan, dan gender) didapat dari situs resmi masing-masing suatu daerah

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi dari pemerintah daerah kab/kota di Pulau Sulawesi yang terdiri dari 70 kabupaten dan 11 kota.. Metode sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yang adalah pengambilan sampel yang berdasar mengenai pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampel yang telah ditentukan peneliti. Adapun kriteria tersebut adalah 1) LKPD Kab/Kota di Pulau Sulawesi tahun 2018-2020 dari situs resmi www.bpk.go.id dan 2) Laporan keuangan periode tahun 2018-2020 telah lengkap yaitu LRA dan Neraca yang diperoleh dari www.djpk.kemenkeu.go.id

Definisi Operasional dan Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel dependen kinerja keuangan daerah pemerintah daerah serta variabel independennya adalah ukuran (*size*) pemerintah, karakteristik kepala daerah (masa kerja, umur, pendidikan, dan gender) dan temuan audit BPK.

Variabel	Definisi	Pengukuran
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Perwujudan dari pencapaian daerah dalam periode tertentu terkait dengan keuangan daerah (Tama and Adi 2018).	Rasio Efisiensi : $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Realisasi Pengeluaran PAD}} \times 100\%$
		Rasio Efektivitas : $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$
		IKR : $\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pengeluaran Rutin}} \times 100\%$
Dari ketiga rasio tersebut akan dihitung rata-ratanya		

Ukuran Pemerintah Daerah (X_1)	Tinggi rendahnya ukuran pemerintah sangat berpengaruh dalam kegiatan operasional perusahaan (Aziz 2016).	Total aset dalam neraca pemerintah daerah.
Karakteristik Daerah (X_2)	Kepala kepala daerah yang memiliki kualitas berperan penting dalam pencapaian tujuan pemerintahan (Pahlevi and Setiawan 2017)	Masa Kerja (Lama menjabat) Umur Tingkat Pendidikan : - SMA/ STM/SMK (1) - S1/Akml/Akpol (2) - S2 (3) - S3 (4) Gender (Perempuan 1, Laki-laki 0)
Temuan Audit BPK (X_3)	kasus pelanggaran atas Undang-undang yang berlaku mengenai pemeriksaan LKPD pemda (Artha, Basuki, and MT 2016)	Temuan Audit BPK (jumlah temuan audit dalam satuan unit)

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi). Selanjutnya menggunakan analisis linear

berganda untuk menguji hipotesis. Dalam mengelolah dan menganalisis data dilakukan dengan program *SPSS*. Formulasi persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini terkait dengan hipotesis yaitu sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{SIZE} + \beta_2 \text{Masa Kerja} + \beta_3 \text{Umur} + \beta_4 \text{Pendidikan} + \beta_5 \text{Gender} + \beta_6 \text{Temuan} + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

SIZE = Ukuran (*size*) Pemerintah Daerah

Masa Kerja = Lama Menjabat Kepala Daerah

Umur = Umur Kepala Daerah

Pendidikan = Tingkat Pendidikan Kepala Daerah

Temuan = Temuan Audit BPK

α = Konstan

β_1, \dots, β_6 = Koefisien Regresi

ε = Error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Gambaran Umum

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh karakteristik kepala daerah, ukuran pemerintah dan temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Pulau Sulawesi. Penelitian ini menggunakan populasi dari kepala daerah kabupaten/kota yang berada

di Pulau Sulawesi dalam periode 2018-2016 (dari masing-masing kepala daerah). Jumlah sampel yang digunakan peneliti adalah sebanyak 74 kabupaten/kota berdasarkan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Penelitian ini terdapat beberapa data yang terlalu ekstrim seperti total aset dari suatu daerah dengan daerah yang lain terlalu jauh selisihnya sehingga tidak dapat dijadikan sampel.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil Analisis Deskriptif

	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Ukuran	843.573.294.34	29.907.454.974.	2.499.156.883.8	3.271.334.081.7
	7,00	078,80	94,0650	32,06700
Masa_Kerja	5	15	7,86	2,765
Umur	30	68	50,40	7,461
Pendidikan	1	4	2,65	,852
Gender	0	1	,09	,293
Temuan_Audit	5	30	13,62	4,413
Kinerja_Keuangan	,17	,56	,3780	,07154

Sumber : data sekunder diolah

*dalam ribuan

Ukuran pemerintah daerah diukur dari total aset yang dimiliki setiap daerah. Penelitian ini memiliki rata-rata nilai ukuran sebesar Rp. 2.499.156.883.984,07. Total aset terbesar terdapat di Kota Makassar yaitu sebesar Rp 29.907.454.974.078,80 dan total aset terendah terdapat di Kabupaten Muna Barat yaitu sebesar 843.573.294.347,00. Variabel ukuran pemerintah daerah pada penelitian ini memiliki nilai deviasi standar yang cukup besar, lebih besar dari nilai rata-rata yaitu sebesar Rp. 3.271.334.081.732,07. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan yang cukup besar antara kepemilikan aset setiap daerah yang menjadi sampel dalam penelitian. Karakteristik pemerintah daerah yang pertama masa kerja yang memiliki rata-rata sebesar 7,86. Masa kerja terlama adalah 15 tahun dan masa kerja tersingkat adalah 5 tahun. Karakteristik kedua yaitu umur yang memiliki nilai rata-rata sebesar 50,40. Nilai minimum pada umur 30 tahun yang merupakan Bupati dari Kabupaten Gowa dan nilai maximum pada umur 68 tahun yang

merupakan Bupati dari Kab. Sidenreng Rappang. Karakteristik yang ketiga yaitu tingkat pendidikan yang memiliki rata-rata sebesar 2,65. Tingkat pendidikan terendah (SMA/SMK/AKMIL/AKPOL), yaitu Bupati Pohuwotu, Bupati Kepulauan Selayar, Bupati Buton Selatan, Bupate Konawe, Bupati Mamuju Tengah dan Bupati Polewali Mandar. Tingkat pendidikan tertinggi (S3) yaitu Bupati Minahasa, Bupati Kepulauan Talaud, Walikota Manado, Bupati Bone Bolango, Bupati Gorontalo, Bupati Gorontalo Utara dan Walikota Gorontalo. Karakteristik yang keempat gender yang memiliki rata-rata sebesar 0,9 dengan nilai maximum sebesar 1 dan nilai minimum sebesar 0.

Jumlah temuan audit BPK memiliki rata-rata sebesar 13,62 dengan nilai maximum sebanyak 30 temuan dan nilai minimum sebanyak 5 temuan. Temuan audit BPK terbanyak terdapat di Kabupaten Minahasa Selatan dan temuan audit BPK terendah terdapat di Kabupaten Bulukumba.

Kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Sulawesi memiliki rata-rata 0,3680 yang berarti bahwa pemerintah daerah di Pulau Sulawesi memiliki kinerja yang sangat efisien. Kriteria dari persentase kinerja keuangan yaitu : dibawah dari 60% menunjukkan kinerja keuangan sangat efisien; 60% - 80% menunjukkan kinerja keuangan tergolong efisien; 80% - 90% menunjukkan kinerja keuangan cukup efisien; 90% - 100% menunjukkan kinerja kurang efisien; dan diatas 100% kinerja keuangan tersebut tergolong tidak efisien. Hasil dari rata-rata kinerja keuangan

pemerintah daerah Pulau Sulawesi menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah mampu membelanjakan dana sesuai dengan anggaran yang ada dan juga pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat sudah sangat baik.

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik terlebih dahulu sebelum melakukan analisis linear berganda untuk menguji hipotesis

Uji Normalitas

Tabel 3. 1 Hasil uji statistik Kolmogrof-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		222
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,06785469
Most Extreme Differences	Absolute	,054
	Positive	,041
	Negative	-,054
Test Statistic		,054
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber : dara sekunder (diolah)

Dalam penelitian ini menggunakan alat uji *One Sample Kolomogorov Smirnov* untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Jika nilai signifikan > 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal dan jika nilai signifikan < 0,05 maka data tersebut terdistribusi

normal. Tabel diatas menunjukkan bahwa data penelitian telah terdistribusi normal yang dibuktikan dengan *asymp sig.* sebesar 0,200, maka data dapat digunakan dalam pengujian dengan model regresi berganda.

Uji Multikolinieritas

Tabel 3. 2 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized B	Coefficients std. error	t	Sig.	Colinearity Tolerance	Statistic VIF
(Constant)	,396	,042	9,487	,000		
Ukuran	6,074E-15	,000	4,192	,000	,953	1,049
Masa_Kerja	,000	,002	,222	,824	,901	1,109
Umur	-5,089E-5	,001	-,078	,938	,915	1,093
Tingkat_Pendidikan	,000	,006	-,071	,944	,939	1,065
Gender	,003	,017	,155	,877	,894	1,118
Temuan_Audit	-,002	,001	-2,287	,023	,991	1,009

Sumber : data sekunder (diolah)

Penelitian ini menggunakan *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF), yaitu jika *tolerance value* < 0,01 dan VIF > 10% maka terjadi multikolinieritas begitu pun sebaliknya jika *tolerance value* > 0,01 dan VIF < 10% maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk

semua variabel dalam tiap-tiap model regresi lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF untuk semua variabel dalam tiap-tiap model regresi lebih kecil dari 10 sehingga disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas antara variabel bebas.

Uji Heteroskedastistas Glejser

Tabel 3. 3 Hasil Uji Heteroskedastistas

Model	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	t	Sig.
(Constant)	,044	,027	1,627	,105
Ukuran	-2,981E-16	,000	-,319	,750
Masa_Kerja	-,001	,001	-1,041	,299
Umur	1,313E-5	,000	,031	,975
Pendidikan	,001	,004	,186	,852
Gender	,002	,011	,212	,832
Temuan_Audit	,001	,001	1,628	,105

Sumber : data sekunder (diolah)

Uji heteroskedastistas pada penelitian ini menggunakan metode *Glejser*, dengan cara meregresikan variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastistas begitupun sebaliknya jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa terdapat masalah heteroskedastistas. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan

variabel ukuran sebesar 0,750, variabel masa kerja sebesar 0,299 variabel umur sebesar 0,975 variabel tingkat pendidikan sebesar 0,852, variabel gender 0,832, dan variabel temuan audit sebesar 0,105. Nilai signifikan dari keenam variabel independen tersebut lebih besar dari nilai 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastistas.

Uji Autokorelasi

Tabel 3. 4 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,477 ^a	,228	,203	,06402	1,992

Sumber : data sekunder (diolah)

Penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson untuk menguji adanya autokorelasi pada residual. Tabel 3.4 menunjukkan Durbin Waston sebesar 1,992 yang berada diantara du

yaitu 1,82581 dan 4-du yaitu 2,17416. Hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4. 1 Hasil uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	t	sig	keterangan
(Constant)	,396	,042	9,487	,000	
Ukuran	6,074E-15	,000	4,192	,000	Diterima
Masa_Kerja	,000	,002	,222	,824	Ditolak
Umur	-5,089E-5	,001	-,078	,938	Ditolak
Pendidikan	,000	,006	-,071	,944	Ditolak
Gender	,003	,017	,155	,877	Ditolak
Temuan_Audit	-,002	,001	-2,287	,023	Diterima
R Square		0,100			
Adjusted R Square		0,075			
F Hitung		3,995			
Sig. f		,001			

Sumber : data sekunder (diolah)

*signifikan pada tarif signifikansi 5% ($\alpha = 5\%$)

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai F hitung 3,995 > Ftabel 2,14 dan nilai signifikan 0,001 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda ini layak dilakukan dan variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Sedangkan, adjusted R² sebesar 0,100 yang berarti bahwa pengaruh variabel independen (ukuran, karakteristik dan temuan) terhadap variabel dependen (kinerja keuangan) adalah sebesar 10%.

3.2. Pembahasan

Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Hasil dari pengujian hipotesis pertama (H₁) pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diukur berdasarkan total aset memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 4,192 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05 yang berarti adanya pengaruh positif antara ukuran pemerintah daerah yang diukur dari total aset dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi ukuran pemerintah daerah maka bisa mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Ukuran pemerintah daerah yang besar bisa membantu pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga H₁ pada penelitian ini sesuai dengan hipotesis

yang dikembangkan yaitu ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2016), Andani, Sarwani, & Respati (2019), dan (Artha, Basuki, & MT 2016) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Masa Kerja Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian pada variabel karakteristik pemerintah yaitu masa kerja menurut tabel 4.1 menunjukkan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,222 dengan nilai signifikan sebesar 0,824 lebih besar dari 0,05, artinya tidak adanya pengaruh antara masa kerja terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin lama masa kerja kepala daerah tidak berpengaruh dalam meningkatkan kinerja keuangan yang lebih baik. Sehingga H_{2a} pada penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang dikembangkan yaitu masa kerja kepala daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dinyatakan ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Mahardini 2014) yang menyatakan bahwa masa kerja dari kepala daerah tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemudian hasil penelitian

ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Tama & Adi (2018) , Misdi (2015), Pahlevi & Setiawan(2017) yang menyatakan bahwa semakin lama kepala daerah menjabat dapat memberikan kinerja keuangan yang semakin efektif.

Umur Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Variabel karakteristik kepala daerah yaitu umur pada tabel 4.1 menunjukkan nilai koefisien regresi negatif sebesar -0,078 dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,938. Artinya umur kepala daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemungkinan hal ini dikarenakan tidak adanya kaitan umur dari kepala daerah terhadap pengambilan keputusan dari informasi-informasi yang diterima. Kepala daerah mampu menerima dan beradaptasi dengan perubahan yang ada sehingga bisa menciptakan inovasi untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah tanpa bergantung dengan umur. Sehingga H_{2b} pada penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang dikembangkan yaitu umur kepala daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ditolak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tama & Adi 2018).

Tingkat Pendidikan Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Hasil dari pengujian hipotesis variabel karakteristik kepala daerah tingkat pendidikan menunjukkan nilai koefisien regresi negatif yaitu -0,071 dengan nilai signifikansi 0,944 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1 variabel karakteristik kepala daerah yang di proksikan dengan tingkat pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara tingkat pendidikan kepala daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan kepala daerah belum tentu mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan tingkat pendidikan yang paling rendah adalah SMA/STM/SMK salah satunya bupati Polewali Mandar dengan tingkat pendidikan SMA. Meskipun

mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, pencapaian kinerja pemerintahan kabupaten Polewali Mandar masih lebih dari hasil kinerja pemerintahan kabupaten Pasang Kayu yang memiliki tingkat pendidikan S3. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan tingginya tingkat pendidikan kepala daerah belum tentu bisa membuat kinerja keuangan yang baik. Dengan demikian hasil uji hipotesis tidak sesuai dengan hipotesis yang dikembangkan yaitu tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dinyatakan ditolak. Hasil penelitian uji hipotesis H_{2c} tidak sesuai dengan hipotesis yang dikembangkan yaitu tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah dinyatakan ditolak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tama & Adi (2018) yang menyatakan bahwa karakteristik kepala daerah yang diproksikan dengan tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Gender Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Variabel karakteristik pemerintah daerah yang diproksikan dengan gender memiliki koefisien regresi positif yaitu 0,155 dengan nilai signifikansi 0,877 lebih besar dari 0,05. Artinya bahwa tidak adanya pengaruh gender kepala daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah. Kepala daerah baik yang bergender laki-laki maupun perempuan tidak menjamin tercapainya kinerja yang semakin baik. Dalam pencapaian kinerja keuangan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan maupun dalam menjalankan masa pemerintahannya. Dengan demikian hasil uji H_{2d} tidak sesuai dengan hipotesis yang dikembangkan yaitu gender berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dinyatakan ditolak. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Pahlevi & Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa kepala daerah perempuan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan kinerja kepala daerah laki-laki.

Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan

Variabel temuan audit pada penelitian ini memiliki nilai koefisien regresi negatif yaitu -2,287 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,023. Artinya temuan audit memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan jumlah temuan audit dalam satuan unit. Semakin banyak jumlah temuan audit oleh BPK maka bisa membuat kinerja keuangan semakin rendah. Hasil uji hipotesis H_3 sesuai dengan hipotesis yang dikembangkan yaitu temuan audit memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga H_3 dinyatakan diterima.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marfiana & Kurniasih (2013) yang mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang memiliki jumlah temuan audit BPK yang tinggi maka menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut semakin rendah. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tama & Adi (2018) yang menyatakan bahwa kerugian dan ketidakefisienan kinerja keuangan bisa terjadi ketika terdapat temuan atas pelanggaran perundang-undangan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti & Kiswanto (2016) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh temuan audit terhadap kinerja keuangan, masukan dan saran yang diberikan BPK hanya formalitas dan tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk melakukan kinerja keuangan dengan baik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diukur dari total aset memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi ukuran pemerintah maka semakin baik juga kinerja keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Sementara itu variabel karakteristik kepala daerah yang diproyeksikan masa kerja, umur, tingkat pendidikan, dan gender tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemudian temuan audit BPK memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin banyak jumlah temuan audit BPK maka kinerja keuangan pemerintah akan menurun.

Dalam melakukan penelitian terdapat keterbatasan peneliti yaitu ketika pengolahan data, terdapat beberapa data yang terlalu ekstrim seperti total aset dari suatu daerah dengan daerah lain memiliki selisih yang jauh. Dengan demikian penelitian ini hanya menggunakan 74 sampel dari 81 kabupaten/kota yang ada di Pulau Sulawesi.

Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain, khususnya terkait dengan karakteristik kepala daerah yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah seperti latar belakang sosial, ideologi politik dan juga menambahkan variabel opini audit bahkan nilai temuan audit dalam rupiah. Penggunaan proksi nilai temuan dan opini audit akan lebih tepat dalam menentukan tingkat materialitas suatu temuan. Selanjutnya juga bisa menggunakan daerah lain untuk dijadikan objek dalam melakukan penelitian. Dengan berkembangnya zaman serta semakin banyaknya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas data informasi terkait yang dapat dengan mudah diperoleh sehingga peneliti selanjutnya bisa lebih komprehensif lagi. Hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan kepala daerah dalam melakukan pengendalian internal yang baik untuk mengurangi jumlah temuan audit BPK. Pemerintah dapat meningkatkan aset suatu daerah dan juga menggunakannya dengan baik untuk menciptakan kinerja keuangan pemerintah semakin baik.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah-Nya, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Berbagai pihak yang telah mendukung saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih Kepada :

- 1) Kedua Orangtua dan saudara dara saya Megawati Rensi dan Patra Lalanlangi, yang senantiasa memberikan saya dukungan baik moril maupun material.
- 2) Bapak Dr. Yefta Andi Kus Nugroho, SE., M.Si, Akt, CA., CMA selaku kaprodi sekaligus walistudi saya yang senantiasa membantu dan mengarahkan saya selama masa perkuliahan.

- 3) Bapak David Adechandra Ashedica Pesudo, SE.,M.Ak selaku dosen pembimbing dari awal penulisan hingga selesai.
- 4) Sahabat-sahabat saya Viora Cita Sari, Dana Tandi Gala dan Agrianata Dika yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam penulisan tugas akhir ini.
- 5) Teman saya Fierda Nainggolan dan Filadelfia yang sangat berperan membantu saya dalam penulisan. Reski Alpari, Hendrik, Adrianus, Dika, dan Peter yang selalu setia mendengar keluh kesah saya selama penulisan tugas akhir saya.
- 6) Untuk diri saya yang sudah mau berjuang dan bangun dari kemalasan.
- 7) Dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

6. REFERENSI

- Andani, Mega, Sarwani Sarwani, and Novita Weningtyas Respati. 2019. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi* 9 (2): 111–30. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.111-130>.
- Artha, Risma Diri, Prayitno Basuki, and Alamsyah MT MT. 2016. "PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB)." *InFestasi* 11 (2): 214. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i2.1133>.
- Aziz. 2016. "PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur)" XI (1): 86–101.
- Hendro Sumarjo. 2010. *Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Indonesia)*.
- Khasanah, Nur Lailatul, and Shiddiq Nur Rahardjo. 2014. "No Title." *PENGARUH KARAKTERISTIK, KOMPLEKSITAS, DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH*.
- Mahardini, Nikke Yusnita. 2014. "Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Dengan Lokasi Pemerintahan, Jumlah Populasi Dan Besar APBD Sebagai Variabel Kontrol." *Perpustakaan Universitas Sebelas Maret*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/41755/MTM5Njk4/PENGARUH-KARAKTERISTIK-KEPALA-DAERAH-TERHADAP-KINERJA-KEUANGAN-PEMERINTAH-DAERAH-DI-INDONESIA-DENGAN-LOKASI-PEMERINTAHAN-JUMLAH-POPULASI-DAN-BESAR-APBD-SEBAGAI-VARIABEL-KONTROL-abstrak.pdf>.
- Marfiana, Nandhya, and Lulus Kurniasih. 2013. "Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota." *Journal & Proceeding Universitas Jenderal Soedirman* 3 (1): 1–16.
- Misdi. 2015. *Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011 s.d. 2012)*.
- Mustikarini, Widya Astuti, and Debby Fitriyani. 2007. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2007." *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV Banjarmasin* 2004 (32): 1–23.
- Noviyanti, Nur Ade, and Kiswanto. 2016. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap

- Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Accounting Analysis Journal* 5 (1): 1–10. <https://doi.org/10.15294/aaj.v5i1.9759>.
- Pahlevi, Agus Reza, and Doddy Setiawan. 2017. “Apakah Karakteristik Kepala Daerah Berdampak Terhadap Kinerja Pemerintahan?” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 8 (3): 571–82. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7074>.
- Sari, Indah Puspa. 2019. “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *JOMFekom* 4 (1): 843–57. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>.
- Sulselprov.go.id. 2021. “Pemprov Sulsel Mendapatkan Opini WDP Dari BPK Perwakilan Sulsel.” Sulselprov.Go.Id. 2021. <https://sulselprov.go.id/welcome/post/pemprov-sulsel-mendapatkan-opini-wdp-dari-bpk-perwakilan-sulsel>.
- sulteng.bpk.go.id. 2009. “Temukan 100 Kasus, Kerugian Rp46,23M Hasil Pemeriksaan BPK RI Terhadap APBD Donggala TA 2008.” <https://sulteng.bpk.go.id/temukan-100-kasus-kerugian-rp4623-m-hasil-pemeriksaan-bpk-ri-terhadap-apbd-donggala-ta-2008/>.
- Suryaningsih, Ni, and Eka Sisdyani. 2016. “Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *E-Jurnal Akuntansi* 15 (2): 1453–81.
- Tama, I Gusti Made Ary Anggara, and Priyo Hari Adi. 2018. “Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, Dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (The Influence of Regional Head Characteristics, Government Size, and Audit Findings on Regional Financial Performance).” *Perspektif Akuntansi* 1 (1): 91–113. <http://ejournal.uksw.edu/persi>.